

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak Indonesia merdeka, pajak telah sumber pendapatan bagi pemerintahan. Pajak memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara, terutama dalam pembangunan nasional. Dalam upaya untuk meningkatkan sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang membiayai pengeluaran negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena adanya UU No. 32 tahun 2004 bertujuan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam menjalankan otonomi daerah didaerahnya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintahan pusat, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan objek dan subjek.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Tata Cara Perpajakan. Pajak sangat penting bagi pemerintahan karena pajak merupakan salah satu sumber yang paling utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Untuk mendukung pembiayaan negara terutama dalam pembangunan nasional.

Pajak daerah berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat, begitu juga dengan retribusi daerah memiliki aturan subjek, objek, tarif dan pemungutan yang berbeda, yang mungkin berbeda dengan pajak daerah lainnya. Disisi lain otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, setiap provinsi atau kabupaten/kota dapat mengatur wilayahnya sendiri.

Sumber pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor berperan penting dalam pembangunan daerah, sehingga setiap individu dan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib mematuhi dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (BAPENDA) adalah instansi teknis di bidang pemungutan dan pendapatan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengumpulan anggaran daerah.

Saat ini, penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai pengganti angkutan umum seperti, bus, kereta api, atau angkutan umum lainnya. Hal ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Semakin banyak jumlah kendaraan, semakin banyak masyarakat yang tidak memahami tata cara pembayaran dan penerimaan pajak. Saat ini proses pemungutan pajak masih belum optimal, karena masyarakat belum mengetahui prosedur pembayaran pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya upaya pihak berwenang dalam pemungutan pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pembayaran pajak kendaraan.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disediakan oleh SAMSAT dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam sebuah tugas akhir yang berjudul : **“Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Padang”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan berikut diidentifikasi :

1. Bagaimana prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang?
2. Bagaiman upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang?

1.2 Tujuan Penulisan Laporan

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang.

1.3 Manfaat Penulisan Laporan

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan bagaimana prosedur penerimaan pajak kendaraan dan apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan pemungutan pajak kendaraan pada kantor Samsat Kota Padang dan dapat menambah pengetahuan mengenai langsung dunia kerja nyata.

2. Bagi universitas

Terjadinya kerja sama antara Universitas andalas dengan kantor Samsat Kota Padang.

3. Bagi instansi tempat magang

Dapat memberikan masukan, kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja di lingkungan bisnis.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, penulis membahas tentang prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang.

1.4 Tempat Magang

Di Kantor Samsat Kota Padang Jln. Asahan No. 12 Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, lama waktu magang selama 40 hari.